



Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Probolinggo selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan strategis. Melalui dokumen ini, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi rakyat. Terwujudnya Renstra ini tidak lepas dari partisipasi, masukan, serta kerja sama berbagai pihak, khususnya jajaran Sekretariat DPRD, DPRD Kota Probolinggo, perangkat daerah terkait, serta seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kontribusinya.

Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi rapat dewan, sehingga tercipta sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan Kota Probolinggo yang lebih maju, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Probolinggo, 19 September 2025

Sekretaris DPRD Kota Probolinggo



Drs. Teguh Bagus Sujawanto, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051990031015

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
<i>Daftar Isi</i>.....	2
<i>Daftar Gambar</i>.....	4
<i>Gambar Tabel</i>.....	5
<i>BAB I</i>.....	6
<i>PENDAHULUAN</i>.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<i>BAB II</i>.....	12
<i>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS</i>	
<i>PERANGKAT DAERAH</i>.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024.....	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	20
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	25
2.2.2 Isu Strategis.....	26
<i>BAB III</i>.....	28
<i>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</i>	28
3.1 Tujuan perangkat daerah.....	28
3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat	29

3.3 Strategi Sekretariat Perangkat Daerah	30
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	31
BAB IV.....	33
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN.....	33
4.1 Uraian Program.....	33
4.2 Uraian Kegiatan	33
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	42
4.4 Uraian Sub-Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	58
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	59
BAB V PENUTUP	61

Daftar Gambar

<i>Gambar 2.1 Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 2.3 Perbandingan SDM Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2.4 Perbandingan anggota DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2025-2029..</i>	<i>22</i>

Gambar Tabel

<i>Tabel 2.1 Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ...</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 2.2 Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kota Probolinggo</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 2.3 Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2.4 Aset Sekretariat DPRD Kota Probolinggo</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2.6 Serapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2.7 Daftar mitra dan urusan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 2.8 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 3.2 Strategi penahapan Renstra.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....</i>	<i>60</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini menuntut adanya peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efisien, akuntabel, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah, termasuk Sekretariat DPRD, dituntut untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen Renstra PD disusun sebagai bentuk penjabaran sistematis dari RPJMD dan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan DPRD, serta membangun sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo juga mempertimbangkan kondisi dan tantangan lingkungan strategis yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, termasuk permasalahan internal organisasi, dinamika politik daerah, perkembangan regulasi, serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, akuntabel, dan berkesinambungan, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Probolinggo.

Selain sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD), dokumen ini juga berfungsi sebagai media dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan. Sekretariat DPRD Kota Probolinggo diharapkan mampu memperkuat peran fasilitatifnya terhadap DPRD, meningkatkan kualitas dukungan administratif, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku dan relevan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota 5 Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
 22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
 27. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dimaksudkan disamping untuk penyesuaian dan penyempurnaan atas tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Hal ini juga untuk digunakan sebagai landasan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur

pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Tujuan penyusunan Renstra ini antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan dari Sekretariat DPRD.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas kebijakan program.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam rangka mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Terkait dengan komponen penulisan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Sekretariat DPRD;
 - 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD;

- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.1.5 Mitra Sekretariat DPRD Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor dan kehumasan;
 - b. Penyiapan data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan proses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d. Pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur kerja di lingkup sekretariat DPRD;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan serta rumah tangga, protokol dan kehumasan;
 - f. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta sekretariat DPRD;
 - g. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekretariat DPRD;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub-Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur kerja sekretariat DPRD;

- d. Melaksanakan urusan surat-menyurat yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat DPRD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai di lingkup Sekretariat DPRD;
 - g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - h. Melaksanakan kegiatan tata kearsipan;
 - i. Rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
 - j. Memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - k. Menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD;
 - l. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
 - m. Menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers dan menyiapkan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait;
 - n. Melaksanakan pengelolaan, penyajian dan pelayanan informasi;
 - o. Menyediakan pelayanan informasi melalui website DPRD/Sekretariat DPRD;
 - p. Mengoordinasikan pelaksanaan keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol; dan
 - r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan di bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan anggaran;
 - b. Pengolahan program dan rencana anggaran kegiatan sekretariat DPRD;
 - c. Perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan sekretariat DPRD;
 - d. Pengelolaan administrasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan sekretariat DPRD;
 - e. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya di lingkungan sekretariat DPRD;

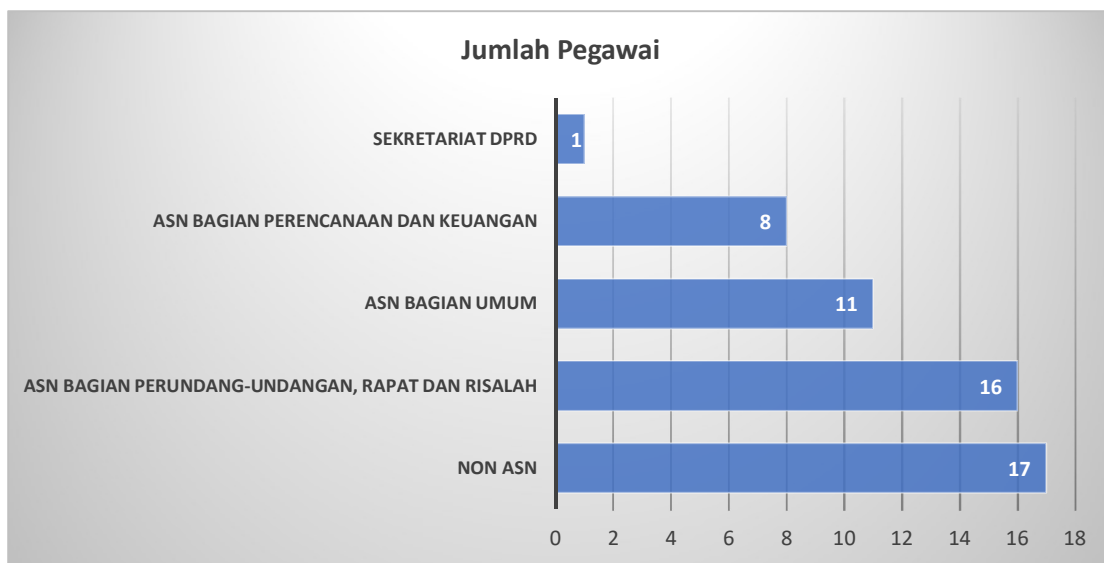
- f. Pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan keuangan;
 - g. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD;
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah. Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah, rapat, risalah, penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah, mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan verifikasi penyusunan Naskah Akademik;
 - b. Pengekoordinasian bahan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan verifikasi bahan penyiapan Draft Peraturan Daerah Inisiatif;
 - d. Pelaksanaan verifikasi bahan pembahasan Peraturan Daerah;
 - e. Pelaksanaan verifikasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
 - f. Pelaksanaan verifikasi data atau bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - g. Pengevaluasian rumusan dalam rangka pengawasan;
 - h. Pengevaluasian bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - i. Pengekoordinasian program dan jadwal rapat dan sidang;
 - j. Pengekoordinasian pembahasan KUA PPAS dan APBD/APBDP;
 - k. Pengekoordinasian pembahasan Peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan;
 - l. Pelaksanaan evaluasi rumusan dapat dalam rangka pengawasan;
 - m. Pelaksanaan evaluasi bahan rapat internal DPRD;
 - n. Pelaksanaan verifikasi bahan dalam penegakkan kode etik DPRD;
 - o. Pelaksanaan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - p. Pengevaluasian bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - q. Pengekoordinasian kegiatan hearing atau dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - r. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

- s. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ditunjang oleh sumber daya perangkat daerah yang mencakup baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung lainnya. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan administratif dan fasilitatif terhadap DPRD, komposisi status SDM yang ada pada Sekretariat DPRD dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

Berdasarkan jumlah pegawai sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1, berikut ini disajikan komposisi pangkat atau golongan pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I A	0
	Golongan I B	0
	Golongan I C	0
	Golongan I D	0
	Golongan I :	0

No	Uraian	Jumlah
2	Golongan II A	0
	Golongan II B	2
	Golongan II C	1
	Golongan II D	6
	Golongan II :	9
3	Golongan III A	10
	Golongan III B	4
	Golongan III C	1
	Golongan III D	3
	Golongan III :	18
4	Golongan IV A	2
	Golongan IV B	2
	Golongan IV C	1
	Golongan IV D	0
	Golongan IV E	0
	Golongan IV :	5
	PPPK	4
	Jumlah	36

Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

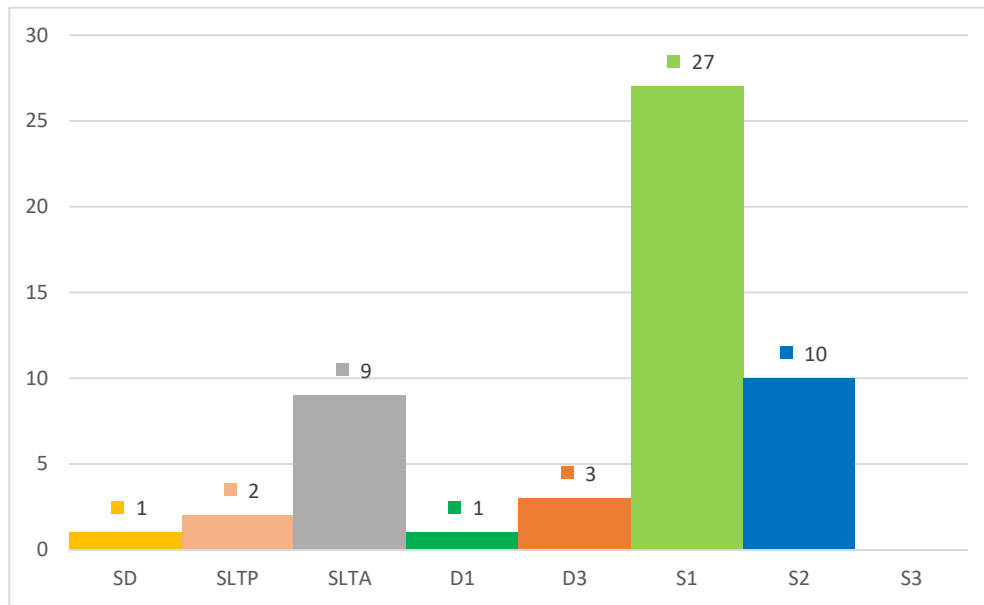
Selanjutnya, untuk mengetahui struktur jabatan dalam organisasi, disajikan komposisi pejabat struktural Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi jabatan struktural di lingkungan sekretariat, yang mencerminkan struktur organisasi dan tingkat tanggung jawab manajerial yang dimiliki masing-masing pejabat.

Tabel 2.2 Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Eselon II. B	1
2	Eselon III. A	2
3	Eselon IV. A	1
	Jumlah	4

Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

Di samping struktur jabatan, tingkat pendidikan pegawai juga menjadi salah satu indikator kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Gambar 2.1 berikut menyajikan komposisi pendidikan terakhir dengan total 53 pegawai di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kompetensi dan perencanaan kebutuhan pelatihan pegawai ke depan.



Gambar 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

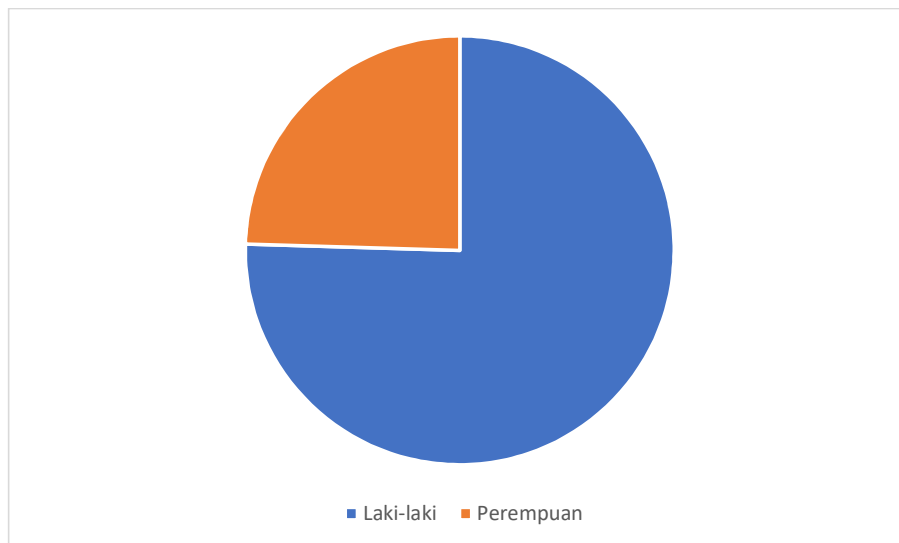
Selain tingkat pendidikan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk dianalisis guna mendukung kebijakan kesetaraan gender serta pengelolaan SDM yang inklusif. Tabel 2.3 berikut memperlihatkan perbandingan jumlah antara pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan pada unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Tabel 2.3 Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum	6	3
3	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	1
4	Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah	6	3
5	Kelompok Jabatan Fungsional	4	3
6	PPPK	2	2
7	Pegawai Tidak Tetap	16	1
Jumlah		40	13

Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo menunjukkan dominasi pegawai laki-laki. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik beban kerja yang menuntut mobilitas tinggi, ketangkasan, serta kesiapan dalam mendukung agenda DPRD yang padat, termasuk kegiatan luar kota yang sering berlangsung dalam waktu singkat dan intensif. Tantangan ini turut memengaruhi tingkat partisipasi pegawai perempuan, terutama karena masih adanya tanggung jawab domestik yang dijalani bersamaan dengan peran profesional. Oleh karena itu, penting bagi Sekretariat DPRD untuk menerapkan pendekatan pengarusutamaan gender, antara lain melalui penyusunan kebijakan kerja yang responsif gender, penyediaan fasilitas pendukung kerja yang ramah gender, serta memastikan pembukaan akses yang setara bagi seluruh *stakeholder* untuk menempati jabatan dan peran strategis di lingkungan kerja.



Gambar 2.3 Perbandingan SDM Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
Sumber data: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol Tahun 2025

2. Sumber Daya Aset

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, diperlukan tidak hanya dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Aset atau modal yang bersifat non-materi, menjadi komponen penting dalam menunjang operasional kelembagaan secara optimal. Keberadaan aset-aset tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas institusional, tetapi juga mencerminkan tingkat kesiapan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada para anggota DPRD. Adapun rincian kepemilikan dan nilai aset/modal Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Aset Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Pembidangan Barring	Satuan	Nilai (Rp)
ASET LANCAR			
1	Persediaan Barang Pakai Habis	-	68.723.000,00
ASET TETAP			
2	Tanah	unit	2.290.500.000,00
3	Peralatan dan Mesin	Unit/Set	8.698.159.397,00
4	Gedung dan Bangunan	Unit/Set	6.780.643.713,79
5	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Unit	220.290.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	Unit	48.007.000,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Unit	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	Unit	10.016.675.994,58
JUMLAH ASET TETAP			8.020.924.116,21
ASET LAINNYA			
9	Aset Tidak Berwujud	-	0,00
10	Aset Lain-Lain	-	496.625.501,00
11	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	496.026.806,00
JUMLAH ASET LAINNYA			67.598.695,00
JUMLAH ASET			8.157.245.811,21

Sumber data: Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Tahun 2025

2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kota Probolinggo menggunakan indikator kepuasan masyarakat untuk menggambarkan kinerja yang dicapai pada periode renstra yang sebelumnya (2019-2024). Indeks kepuasan masyarakat tersebut dengan didapatkan dari survey dengan target yang ditetapkan dalam renstra periode sebelumnya. Hasil dari kinerja tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Tahun	Target	Capaian	Rasio (%)
2020	70	77,39	111%
2021	71	77,37	109%
2022	72	73,18	102%
2023	73	78,53	108%
2024	74	85,07	116%

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Secara rinci target di Tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat ditetapkan sebesar 70. Capaian yang diperoleh sebesar 77,39, yang berarti melampaui target sebesar 111%. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun awal Renstra, Sekretariat DPRD telah berhasil menjaga kinerja pelayanan di atas ekspektasi yang direncanakan. Selanjutnya 2021, Target meningkat menjadi 71 dan capaian mencapai 77,37. Rasio capaian terhadap target adalah 109%, menandakan konsistensi kinerja pelayanan, meskipun terjadi peningkatan target. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas layanan dan respons yang baik dari masyarakat.

Di Tahun 2022 Target kembali dinaikkan menjadi 72. Capaian sebesar 73,18 dengan rasio 102%. Meski kenaikan tidak terlalu tinggi dibanding tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD tetap mampu mencapai target, menandakan stabilitas kinerja layanan publik meskipun tantangan tahun berjalan bisa jadi meningkat. Selanjutnya di Tahun 2023 Target ditingkatkan menjadi 73 dan capaian mencapai 78,53, dengan rasio 108%. Ini mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas layanan, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kapasitas internal, penggunaan sistem digital, atau koordinasi yang lebih baik dalam pelayanan kepada DPRD. Sedangkan di Tahun 2024 Menjadi tahun terbaik dengan target 74 dan capaian mencapai 85,07 menghasilkan rasio tertinggi sepanjang periode yaitu 116%. Ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD mampu memaksimalkan kualitas layanan dan inovasi, serta membuktikan efektivitas strategi penguatan kelembagaan yang telah dilakukan selama periode Renstra 2019–2024. Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, dapat dijabarkan juga realisasi anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo pada periode yang sebelumnya dan digambarkan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Serapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)
2020	Rp 38.186.124.414	Rp 35.280.148.539	92%
2021	Rp 39.232.226.291	Rp 36.314.731.722	93%
2022	Rp 44.572.382.337	Rp 41.710.957.136	94%
2023	Rp 44.221.232.376	Rp 40.643.201.698	92%
2024	Rp 50.537.722.627	Rp 49.665.098.645	98%

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

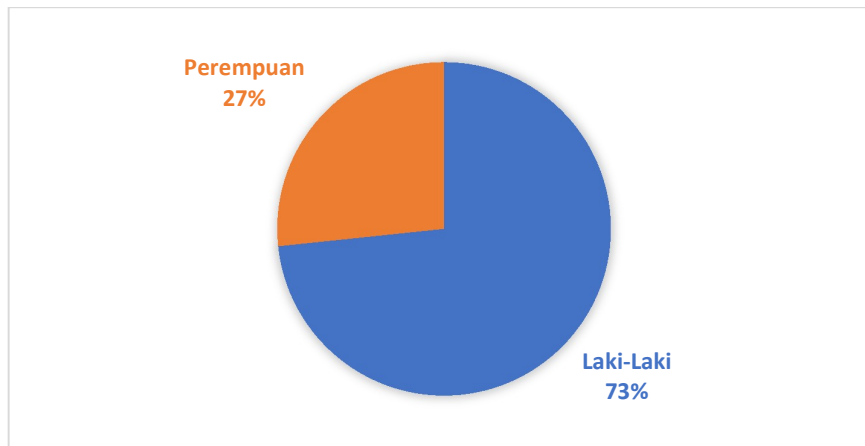
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran utama Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah seluruh Anggota DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2024-2029 yang berjumlah 30 orang. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi,

anggaran, dan pengawasan oleh para anggota dewan, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai penyedia layanan administratif, teknis operasional, serta fasilitasi kegiatan kedewanan. Untuk menunjang peran tersebut, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kota, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 8. Fasilitasi Tugas DPRD

DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2024-2029 yang berjumlah 30 orang dalam menjalankan tugas nantinya akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program dari Walikota Probolinggo. Isu tentang partisipasi dari perempuan dalam aktivitas kerja juga menarik untuk disorot dengan harapan tidak adanya perbedaan perlakuan yang berbasis pada gender. Hal ini juga mempertimbangkan komposisi anggota DPRD Kota Probolinggo pada periode sekarang yang terdiri dari 22 Laki-laki dan 8 Perempuan. Angka

tersebut meningkat keterwakilan perempuan dari 5 orang atau setara dengan 17%. Sehingga dalam proses fasilitasi anggota DPRD tersebut menunjukkan tren positif untuk menuju target 30% pada periode selanjutnya. Selain itu, dengan jenis kelamin yang berbeda tersebut tidak menjadi kendala oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.



Gambar 2.4 Perbandingan anggota DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2025-2029

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan administratif dan fasilitasi terhadap kegiatan legislatif, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo menjadi kunci untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan DPRD, mulai dari penyusunan program kerja, penganggaran, hingga pelaporan dan evaluasi. Mitra kerja ini mencakup unsur-unsur pengawasan, perencanaan, keuangan, hingga pelayanan publik dan infrastruktur. Kehadiran mitra ini tidak hanya memperkuat dukungan teknis dan administratif, tetapi juga memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.7 Daftar mitra dan urusan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Kategori Mitra	Instansi/Lembaga
1	Internal Pemerintah Daerah	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

No	Kategori Mitra	Instansi/Lembaga
		<p>e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;</p> <p>f. Bagian Hukum;</p> <p>g. Bagian Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>h. Bagian Organisasi;</p> <p>i. Bagian Pemerintahan;</p> <p>j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>k. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>l. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;</p> <p>m. Bagian Umum;</p> <p>n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;</p> <p>o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>p. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;</p> <p>q. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;</p> <p>r. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;</p> <p>t. Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>u. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>w. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>x. Dinas Perhubungan;</p> <p>y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;</p> <p>z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>â. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>bb. Inspektorat;</p> <p>cc. Kecamatan Kademangan;</p> <p>dd. Kecamatan Kanigaran;</p> <p>ee. Kecamatan Kedopok;</p> <p>ff. Kecamatan Mayangan;</p> <p>gg. Kecamatan Wonoasih;</p> <p>hh. RSUD Ar Rozy;</p> <p>ii. RSUD Dokter Mohamad Saleh;</p> <p>jj. Satuan Polisi Pamong Praja;</p>
2	Pemerintah Supra Daerah	<p>a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>c. Kementerian Keuangan (DJPK);</p>
3	Lembaga Pengawasan dan Hukum	<p>a. BPK;</p> <p>b. BPKP;</p> <p>c. Kejaksaan;</p> <p>d. Kepolisian</p>
4	Media dan Komunikasi Publik	Media cetak, online, dan elektronik di tingkat lokal Kota Probolinggo, Provinsi dan Nasional.

No	Kategori Mitra	Instansi/Lembaga
5	Organisasi Masyarakat Sipil	a. LSM; b. Organisasi profesi; c. Komunitas lokal
6	Lembaga Pendidikan dan Akademisi	a. Perguruan tinggi; b. Lembaga kajian dan riset kebijakan
7	Masyarakat/Publik	Konstituen/masyarakat umum dalam wilayah Kota Probolinggo.

Adapun ruang lingkup kerja sama Sekretariat DPRD dengan mitra mencakup berbagai aspek dukungan teknis, administratif, hingga komunikasi publik dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal.

Pertama, kerja sama dibangun dengan perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kota Probolinggo. Kolaborasi ini mencakup aspek kepegawaian dan pengembangan SDM, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan kebijakan hukum, layanan protokol, pengadaan barang dan jasa, serta dukungan administrasi dan logistik untuk kegiatan DPRD. Selain itu, integrasi dengan bagian komunikasi pimpinan, dokumentasi, serta dinas terkait juga penting untuk mendukung kegiatan reses, konsultasi publik, dan pembahasan peraturan daerah. Koordinasi dengan kecamatan dan rumah sakit daerah juga diperlukan dalam pelaksanaan kunjungan lapangan atau kegiatan representasi legislatif lainnya.

Kedua, Sekretariat DPRD menjalin kemitraan dengan pemerintah supra daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kemitraan ini umumnya dalam bentuk konsultasi regulasi, sinkronisasi kebijakan, serta dukungan fiskal atau administratif untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari agenda legislatif daerah.

Ketiga, kerja sama juga dilakukan dengan lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, dan Kepolisian. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendampingan terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran DPRD, pelaporan kinerja, serta koordinasi dalam menjaga integritas dan tata kelola kelembagaan yang baik.

Keempat, hubungan kemitraan dengan media dan lembaga komunikasi publik difokuskan untuk membangun eksposur positif terhadap kinerja DPRD. Sekretariat berperan aktif dalam menyediakan informasi, dokumentasi, serta klarifikasi terhadap isu strategis kepada media cetak, online, maupun elektronik di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional.

Kolaborasi ini juga mendukung peningkatan literasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Kelima, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum juga merupakan bagian penting dari strategi kemitraan Sekretariat DPRD. Pihak yang masuk dalam organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi profesi, LSM, komunitas lokal. Peran yang dapat dilakukan adalah untuk mendapatkan masukan yang sesuai dengan kelompok penekan tersebut kepada setiap anggota DPRD.

Keenam, kolaborasi yang dilakukan dengan Lembaga pendidikan. Pihak yang masuk sebagai bagian ini adalah Perguruan tinggi, Lembaga kajian dan riset kebijakan. Peran dari pihak tersebut adalah sebagai sumber pengetahuan terbaru dalam memberikan inovasi dan masukan pada kinerja sekwan dan DPRD secara langsung. Selain itu, peran dari pihak ini adalah untuk proses penyusunan naskah akademik atau dokumen pendukung legislasi dan proses evaluasi kebijakan.

Ketujuh, mitra yang masuk sebagai masyarakat/publik. Peran dari masyarakat luas sebagai konstituen menjadi mitra utama dalam penyampaian aspirasi, pengaduan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan reses dan forum-forum publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Identifikasi terhadap Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah dan terkait dengan kondisi dan aspek yang sangat penting serta menentukan perkembangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo selama 5 tahun kedepan. Permasalahan ini diterjemahkan dari data permasalahan dan isu strategis dewan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD. Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dari Sekreriat DPRD sebagai berikut:

- a) Aturan yang multi tafsir terkait Perjalanan Dinas Dewan yang dapat menjadi masalah dalam proses penentuan keberlangsungan dari kegiatan DPRD.
- b) Lama perjalanan dinas terkait kunjungan kerja yang berkaitan dengan Lokus / Tempat tujuan dan lama kunjungan kerja. Ada tempat tujuan karena dengan adanya TOL bisa dipangkas lama perjalanan dan tidak perlu menginap dalam waktu yang lama.
- c) Kegiatan rapat yang bersamaan dengan perjalanan dinas (terkait makanan dan minuman rapat) dan perlu adanya satu pintu terkait fasilitasi makan minum rapat DPRD.
- d) Penggunaan 30% anggaran untuk Perjalanan Dinas yang dikarenakan tidak ada aturan yang jelas secara rinci terkait penggunaan 30%.

- e) Pokok pikiran (Pokir) Dewan belum diukur sejauh mana perannya dalam memfasilitasi dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab.
- f) Proses pengawasan kinerja Dewan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung penguatan layanan kepada DPRD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sejalan dengan hal tersebut, isu-isu ini telah diakomodasi secara umum dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029. Isu strategis nasional dalam hal pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, terdapat Kenaikan jumlah anggota DPRD perempuan dari 5 orang (17%) pada tahun 2023 menjadi 8 orang (27%) pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif menuju pemenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Adapun isu strategis yang relevan dengan Sekretariat DPRD antara lain:

1. Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi peran legislatif dan eksekutif dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (legislasi, budgeting, controlling).
2. Pemenuhan fasilitas sarana prasarana dalam peningkatan dukungan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Pemenuhan persentase minimal 30% dari kuota keterwakilan jumlah anggota perempuan telah terwakili sebanyak 27% dari jumlah keseluruhan 30 telah terwakili sebanyak 8 perempuan.

Tabel 2.8 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Memperkuat kebijakan dan anggaran yang mendukung daya saing ekonomi lokal	Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD yang berdiri sendiri di bawah Kepala Daerah (Wali Kota) dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai Badan Pembentukan Perda dan sebagai eksekutif akan menjadikan posisi Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator untuk menyesuaikan kepentingan kedua lembaga tersebut	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang semakin masif	Sistem kerja, penilaian kinerja, dan pelaporan berbasis digital	Penguatan peran wakil rakyat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Dibutuhkan peningkatan sinergi dan harmonisasi antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pembangunan ekonomi berbasis budaya lokal yang dapat dikembangkan dengan dukungan kebijakan	Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Perubahan iklim dan tata kelola yang berbasis lingkungan hidup	Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mekanisme pelayanan aspirasi dan publikasi kinerja DPRD yang akurat dan berkala	Penguatan dukungan fasilitas bagi pelaksanaan tugas DPRD, terutama dalam aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Sumber: Kantor Sekretariat Dewan Kota Probolinggo Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan perangkat daerah

Visi dari Walikota Probolinggo pada periode 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD adalah

“MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF”.

Terjemahan dari visi tersebut terdapat 5 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Penjelasan dari 5 kata kunci tersebut diterjemahkan sebagai misi Kota Probolinggo, sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan;
2. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan;
3. Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital;
4. Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan; dan
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan

Lingkungan Sejalan dengan visi dan misi yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dapat diambil beberapa poin penting yang dapat membantu pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut hasil telaahan dari visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh DPRD dan Kepala Daerah merupakan dasar hukum dalam menjalankan proses pemerintahan.
- 2) Anggaran Daerah ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah merupakan instrumen untuk mewujudkan pembangunan daerah.
- 3) Pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- 4) Anggaran Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga Sekretariat DPRD dapat mendorong peran yang melekat dalam legislatif.

Setelah visi dan misi tersebut diterjemahkan, maka dapat ditentukan 1 tujuan yang relevan dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam rangka mencapai tujuan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sampai dengan akhir tahun 2029 adalah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik.”

Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah Kota Probolinggo memiliki tujuan yang diterjemahkan dalam sasaran sebagai berikut:

“Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi.”

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penetapan indikator. Penetapan indikator tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan data IKM pada tahun 2024 sebagai dasar capaian dan hasil dari SAKIP yang juga pada tahun 2024. Dalam usaha untuk mempertegas data tujuan tersebut, selanjutnya diterjemahkan dalam tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selanjutnya disusun dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85,07	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transformasi Pelayanan Publik	Ekosistem Inovasi	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	72,62	73,02	73,41	73,81	74,21	74,61	75,00	

3.3 Strategi Sekretariat Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah terencana yang memuat program-program prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, strategi disusun sebagai kerangka besar (*grand design*) dari proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, termasuk keseimbangan antara kepentingan yang berbeda, capaian kinerja sebelumnya, serta pengembangan layanan yang memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Strategi juga diarahkan agar dapat menyentuh berbagai tema pembangunan yang saling terintegrasi dan saling melengkapi dalam rangka membentuk skenario besar pencapaian tujuan pembangunan. Secara periodik, strategi dibagi menjadi 5 tahapan tahunan, yang mana dioptimalkan untuk mencapai tujuan akhir yang sudah ditetapkan dengan fokus penahapan sebagai berikut:

1. Tahap 1, tahun 2025 difokuskan pada perbaikan kelembagaan internal
2. Tahap 2, tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kinerja lembaga
3. Tahap 3, tahun 2027 difokuskan pada hasil kinerja yang sudah tercapai
4. Tahap 4, tahun 2028 difokuskan pada rencana kinerja periode selanjutnya
5. Tahap 5, tahun 2029 difokuskan pada perbaikan dari capaian yang sudah dilakukan.

Strategi yang dilakukan dalam menjalankan program tersebut dijabarkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi penahapan Renstra

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Penataan kelembagaan dan tata kelola internal	Digitalisasi layanan administrasi dan	Evaluasi dan optimalisasi sistem manajemen	Konsolidasi capaian kinerja dan	Penyelesaian program prioritas sisa waktu RPJMD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Sekretariat DPRD	persidangan DPRD	kinerja dan pelayanan	keberlanjutan program strategis	
Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan budaya kerja ASN	Penguatan peran Sekretariat dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD	Penguatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil (outcome-based)	Optimalisasi dukungan terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah	Finalisasi dokumen evaluasi kinerja akhir Renstra Sekretariat DPRD
Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas pelayanan publik internal	Pendalaman reformasi birokrasi internal dan penilaian mandiri RB	Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian RPJMD	Penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja
Penyusunan baseline kinerja dan standar layanan administrasi DPRD		Inovasi pelayanan administratif berbasis teknologi	Penyusunan rancangan awal dokumen Renstra periode berikutnya	Persiapan transisi dokumen perencanaan menuju periode RPJMD selanjutnya

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang menjadi panduan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh perangkat daerah. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, arah kebijakan disusun sebagai bentuk konkret dari implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan landasan dan panduan dalam melaksanakan tugas dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal. Arah kebijakan ini menjadi pedoman penting agar seluruh kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD mampu selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan menghasilkan kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025–2029 diselaraskan secara langsung dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Penguatan Sinergitas peran Lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

- b. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi

Dalam perumusannya, arah kebijakan dari Perangkat daerah, khususnya sekretariat DPRD dalam mempertimbangkan secara menyeluruh potensi, peluang, tantangan, dan kendala yang mungkin muncul selama periode perencanaan, disusunlah arah kebijakan dari sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sekretariat DPRD

b. Peningkatan kualitas kinerja sekretariat DPRD Dengan arah kebijakan ini, strategi yang dirumuskan dapat diarahkan secara sistematis guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Adapun rincian arah kebijakan Sekretariat DPRD secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD	Penguatan Sinergitas peran Lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sekretariat DPRD	
2	Nilai SAKIP pada sekretariat DPRD	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi	Peningkatan kualitas kinerja sekretariat DPRD	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi unsur staf dan pelayanan administratif guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Probolinggo. Dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan partisipatif, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, fasilitasi persidangan, pembentukan peraturan daerah, serta pelayanan aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, maka seluruh rencana tersebut diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terukur dan sistematis.

Pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, klasifikasi perencanaan program mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dalam kerangka nomenklatur tersebut, program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota, khususnya pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini merupakan kategori program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah karena berkaitan erat dengan fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD. Seluruh kegiatan yang dirancang dalam program ini diorientasikan untuk memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan DPRD dan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Adapun program pada sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4.2 Uraian Kegiatan

Realisasi program kerja dan operasional Sekretariat DPRD Kota Probolinggo pada Masa Jabatan 2026–2029, seluruh kebijakan strategis diturunkan ke dalam bentuk kegiatan yang konkret dan terukur sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung secara langsung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DPRD, terutama dalam memberikan pelayanan administratif, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan sidang, dukungan legislasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD. Seluruh kegiatan yang direncanakan merupakan penjabaran kebijakan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Probolinggo. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		Indeks Pelayanan Publik		
					Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		
				Tercapainya Kinerja Program Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
Terkelolanya Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya BMD Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan ketatalaksanaan	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
				Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Layanan Administrasi DPRD		
				Keanggotaan DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
				Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD		
				Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya			Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan			1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Meningkatnya Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD		Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
				Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya kualitas legislasi, pengawasan, dan penganggaran	3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
				Tercapainya fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	Persentase dokumen kebijakan anggaran yang selesai dibahas tepat waktu	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
				Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tercapainya fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Terpenuhinya fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD	Presentase Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas	Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Terpenuhinya aspirasi masyarakat yg diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Dokumen Kode Etik	Jumlah dokumen/pedoman Kode Etik DPRD yang disusun dan ditetapkan	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terpenuhinya fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi	Fasilitasi Tugas DPRD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo selama Masa Jabatan 2025–2029 disusun secara sistematis dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan rencana ini mempertimbangkan kebutuhan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, seperti fasilitasi rapat paripurna, penyusunan produk hukum daerah, pelayanan administrasi kesekretariatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Setiap program dan kegiatan dirancang agar selaras dengan nomenklatur resmi yang ditetapkan pemerintah pusat dan dilengkapi dengan proyeksi pendanaan yang realistis dan berkelanjutan. Secara rinci, keseluruhan rencana tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang memuat uraian lengkap program, kegiatan, sub kegiatan, dan alokasi pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	100	Rp 38.914.875.797	100	Rp 39.174.969.271	100	Rp 40.263.931.760	100	Rp 41.103.478.524	100	Rp 41.966.551.343	100	Rp 42.829.396.368	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	100	100	Rp 321.314.615	100	Rp 323.462.170	100	Rp 332.453.579	100	Rp 339.385.598	100	Rp 346.511.868	100	Rp 353.636.257	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	Rp 126.184.282	5	Rp 127.027.654	5	Rp 130.558.693	5	Rp 133.280.984	5	Rp 136.079.559	5	Rp 138.877.396	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	Rp 195.130.333	10	Rp 196.434.516	10	Rp 201.894.886	10	Rp 206.104.614	10	Rp 210.432.308	10	Rp 214.758.860	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	Rp 6.486.989.058	100	Rp 6.530.345.833	100	Rp 6.711.872.501	100	Rp 6.851.822.342	100	Rp 6.995.693.903	100	Rp 7.139.527.492	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	37	Rp 6.096.728.391	37	Rp 6.137.476.800	37	Rp 6.308.082.729	37	Rp 6.439.613.114	37	Rp 6.574.829.286	37	Rp 6.710.009.771	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	Rp 91.060.822	1	Rp 91.669.441	1	Rp 94.217.614	1	Rp 96.182.153	1	Rp 98.201.744	1	Rp 100.220.802	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	
	Kuangan Akhir Tahun SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	Rp 299.199.844	12	Rp 301.199.592	12	Rp 309.572.159	12	Rp 316.027.075	12	Rp 322.662.873	12	Rp 329.296.919	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	Rp 65.043.444	100	Rp 65.478.172	100	Rp 67.298.295	100	Rp 68.701.538	100	Rp 70.144.103	100	Rp 71.586.287	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Rp 65.043.444	1	Rp 65.478.172	1	Rp 67.298.295	1	Rp 68.701.538	1	Rp 70.144.103	1	Rp 71.586.287	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	Rp 666.044.871	100	Rp 670.496.482	100	Rp 689.134.545	100	Rp 703.503.749	100	Rp 718.275.613	100	Rp 733.043.577	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	148	148	Rp 178.219.038	148	Rp 179.410.192	148	Rp 184.397.329	148	Rp 188.242.214	148	Rp 192.194.842	148	Rp 196.146.426	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	37	Rp 487.825.833	37	Rp 491.086.291	37	Rp 504.737.215	37	Rp 515.261.535	37	Rp 526.080.771	37	Rp 536.897.151	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	Rp 1.897.045.391	100	Rp 1.909.724.582	100	Rp 1.962.809.969	100	Rp 2.003.736.692	100	Rp 2.045.810.276	100	Rp 2.087.872.756	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	Rp 533.356.244	12	Rp 536.921.011	12	Rp 551.846.022	12	Rp 563.352.612	12	Rp 575.181.643	12	Rp 587.007.552	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	Rp 162.608.611	6	Rp 163.695.430	6	Rp 168.245.738	6	Rp 171.753.845	6	Rp 175.360.257	6	Rp 178.965.717	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Rp 41.627.804	4	Rp 41.906.030	4	Rp 43.070.909	4	Rp 43.968.984	4	Rp 44.892.226	4	Rp 45.815.224	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Rp 162.608.611	2	Rp 163.695.430	2	Rp 168.245.738	2	Rp 171.753.845	2	Rp 175.360.257	2	Rp 178.965.717	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	Rp 13.008.689	1	Rp 13.095.634	1	Rp 13.459.659	1	Rp 13.740.308	1	Rp 14.028.821	1	Rp 14.317.257	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Rp 104.102.033	12	Rp 104.797.814	12	Rp 107.710.922	12	Rp 109.956.812	12	Rp 112.265.637	12	Rp 114.573.852	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Rp 600.046.588	12	Rp 604.057.091	12	Rp 620.848.310	12	Rp 633.793.673	12	Rp 647.101.794	12	Rp 660.406.404	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	Rp 71.547.789	1	Rp 72.025.989	1	Rp 74.028.125	1	Rp 75.571.692	1	Rp 77.158.513	1	Rp 78.744.916	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	Rp 208.139.022	12	Rp 209.530.151	12	Rp 215.354.545	12	Rp 219.844.922	12	Rp 224.461.129	12	Rp 229.076.118	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	Rp 1.561.042.665	100	Rp 1.571.476.131	100	Rp 1.615.159.089	100	Rp 1.648.836.913	100	Rp 1.683.458.467	100	Rp 1.718.070.884	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		4												

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	
Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Disediakan														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	Rp 975.651.666	3	Rp 982.172.582	3	Rp 1.009.474.431	3	Rp 1.030.523.070	3	Rp 1.052.161.542	3	Rp 1.073.794.302	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	45	Rp 585.390.999	45	Rp 589.303.549	45	Rp 605.684.658	45	Rp 618.313.842	45	Rp 631.296.925	45	Rp 644.276.581	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100	100	Rp 2.759.725.700	100	Rp 2.778.170.745	100	Rp 2.855.396.683	100	Rp 2.914.934.809	100	Rp 2.976.141.332	100	Rp 3.037.331.700	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Rp 97.565.167	12	Rp 98.217.258	12	Rp 100.947.443	12	Rp 103.052.307	12	Rp 105.216.154	12	Rp 107.379.430	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Rp 520.347.555	12	Rp 523.825.377	12	Rp 538.386.363	12	Rp 549.612.304	12	Rp 561.152.822	12	Rp 572.690.295	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	Rp 1.068.596.146	12	Rp 1.075.738.270	12	Rp 1.105.641.003	12	Rp 1.128.694.820	12	Rp 1.152.394.659	12	Rp 1.176.088.243	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Rp 1.073.216.832	12	Rp 1.080.389.840	12	Rp 1.110.421.874	12	Rp 1.133.575.377	12	Rp 1.157.377.696	12	Rp 1.181.173.733	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	100	Rp 2.068.381.531	100	Rp 2.082.205.873	100	Rp 2.140.085.793	100	Rp 2.184.708.909	100	Rp 2.230.582.469	100	Rp 2.276.443.921	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	Rp 227.652.055	4	Rp 229.173.602	4	Rp 235.544.034	4	Rp 240.455.383	4	Rp 245.504.360	4	Rp 250.552.004	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kendaraan Dinas Jabatan															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	19	Rp 552.869.277	19	Rp 556.564.463	19	Rp 572.035.511	19	Rp 583.963.073	19	Rp 596.224.874	19	Rp 608.483.438	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	4	Rp 65.043.444	4	Rp 65.478.172	4	Rp 67.298.295	4	Rp 68.701.538	4	Rp 70.144.103	4	Rp 71.586.287	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	37	Rp 474.817.144	37	Rp 477.990.656	37	Rp 491.277.556	37	Rp 501.521.228	37	Rp 512.051.950	37	Rp 522.579.894	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Rp 260.173.778	1	Rp 261.912.688	1	Rp 269.193.182	1	Rp 274.806.152	1	Rp 280.576.411	1	Rp 286.345.147	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	163	163	Rp 487.825.833	163	Rp 491.086.291	163	Rp 504.737.215	163	Rp 515.261.535	163	Rp 526.080.771	163	Rp 536.897.151	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100	100	Rp 22.811.422.927	100	Rp 22.963.886.532	100	Rp 23.602.222.987	100	Rp 24.094.355.004	100	Rp 24.600.277.705	100	Rp 25.106.066.877	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	Rp 22.206.518.894	30	Rp 22.354.939.531	30	Rp 22.976.348.840	30	Rp 23.455.430.700	30	Rp 23.947.937.549	30	Rp 24.440.314.409	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90	90	Rp 487.825.833	90	Rp 491.086.291	90	Rp 504.737.215	90	Rp 515.261.535	90	Rp 526.080.771	90	Rp 536.897.151	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	30	Rp 117.078.200	30	Rp 117.860.710	30	Rp 121.136.932	30	Rp 123.662.768	30	Rp 126.259.385	30	Rp 128.855.316	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	100	Rp 277.865.594	100	Rp 279.722.751	100	Rp 287.498.318	100	Rp 293.492.970	100	Rp 299.655.607	100	Rp 305.816.617	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	30	Rp 4.683.128	30	Rp 4.714.428	30	Rp 4.845.477	30	Rp 4.946.511	30	Rp 5.050.375	30	Rp 5.154.213	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	84	84	Rp 71.547.789	84	Rp 72.025.989	84	Rp 74.028.125	84	Rp 75.571.692	84	Rp 77.158.513	84	Rp 78.744.916	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	Rp 201.634.678	12	Rp 202.982.334	12	Rp 208.624.716	12	Rp 212.974.768	12	Rp 217.446.719	12	Rp 221.917.489	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	Rp 34.399.896.208	100	Rp 34.629.813.131	100	Rp 35.592.432.073	100	Rp 36.334.572.990	100	Rp 37.097.510.421	100	Rp 37.860.246.488	
	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		100		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	100	Rp 1.757.081.153	100	Rp 1.768.824.872	100	Rp 1.817.993.613	100	Rp 1.855.900.757	100	Rp 1.894.870.147	100	Rp 1.933.829.252	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	3	Rp 223.193.012	3	Rp 224.684.756	3	Rp 230.930.410	3	Rp 235.745.560	3	Rp 240.695.642	3	Rp 245.644.417	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5	5	Rp 1.110.198.453	5	Rp 1.117.618.632	5	Rp 1.148.685.530	5	Rp 1.172.636.873	5	Rp 1.197.259.387	5	Rp 1.221.875.404	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	3	Rp 85.936.809	3	Rp 86.511.181	3	Rp 88.915.967	3	Rp 90.769.962	3	Rp 92.675.910	3	Rp 94.581.355	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	3	Rp 311.229.173	3	Rp 313.309.320	3	Rp 322.018.506	3	Rp 328.732.942	3	Rp 335.635.532	3	Rp 342.536.301	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	Rp 26.523.707	1	Rp 26.700.982	1	Rp 27.443.200	1	Rp 28.015.420	1	Rp 28.603.676	1	Rp 29.191.776	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah					Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen kebijakan anggaran yang selesai dibahas tepat waktu	100	100	Rp 629.781.007	100	Rp 633.990.244	100	Rp 651.613.528	100	Rp 665.200.378	100	Rp 679.167.964	100	Rp 693.131.864	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	Rp 192.865.453	1	Rp 194.154.498	1	Rp 199.551.489	1	Rp 203.712.355	1	Rp 207.989.818	1	Rp 212.266.152	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	Rp 45.435.109	1	Rp 45.738.782	1	Rp 47.010.201	1	Rp 47.990.415	1	Rp 48.998.097	1	Rp 50.005.512	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	Rp 209.046.148	1	Rp 210.443.339	1	Rp 216.293.118	1	Rp 220.803.065	1	Rp 225.439.391	1	Rp 230.074.493	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	Rp 104.397.309	1	Rp 105.095.064	1	Rp 108.016.434	1	Rp 110.268.694	1	Rp 112.584.068	1	Rp 114.898.831	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	Rp 78.036.988	1	Rp 78.558.561	1	Rp 80.742.285	1	Rp 82.425.849	1	Rp 84.156.591	1	Rp 85.886.876	
Pengawasan Urusan Pemerintahan	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang	100	100	Rp 557.233.114	100	Rp 560.957.466	100	Rp 576.550.628	100	Rp 588.572.335	100	Rp 600.930.919	100	Rp 613.286.241	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bidang Pemerintahan dan Hukum	ditindaklanjuti Pemerintah Daerah														
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	Rp 86.083.220	12	Rp 86.658.570	12	Rp 89.067.454	12	Rp 90.924.607	12	Rp 92.833.802	12	Rp 94.742.493	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	12	Rp 85.936.809	12	Rp 86.511.181	12	Rp 88.915.967	12	Rp 90.769.962	12	Rp 92.675.910	12	Rp 94.581.355	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	12	Rp 85.936.809	12	Rp 86.511.181	12	Rp 88.915.967	12	Rp 90.769.962	12	Rp 92.675.910	12	Rp 94.581.355	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	Rp 58.048.723	1	Rp 58.436.701	1	Rp 60.061.089	1	Rp 61.313.428	1	Rp 62.600.861	1	Rp 63.887.954	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1	Rp 125.251.053	1	Rp 126.088.188	1	Rp 129.593.112	1	Rp 132.295.270	1	Rp 135.073.148	1	Rp 137.850.293	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	Rp 115.976.498	1	Rp 116.751.645	1	Rp 119.997.038	1	Rp 122.499.106	1	Rp 125.071.289	1	Rp 127.642.793	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas	100	100	Rp 3.270.278.594	100	Rp 3.292.135.997	100	Rp 3.383.648.835	100	Rp 3.454.201.593	100	Rp 3.526.731.403	100	Rp 3.599.242.071	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	30				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	30	Rp -	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	180	180	Rp 2.624.903.766	180	Rp 2.642.447.709	180	Rp 2.715.900.898	180	Rp 2.772.530.385	180	Rp 2.830.746.763	180	Rp 2.888.947.775	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	3	Rp 106.094.826	3	Rp 106.803.927	3	Rp 109.772.799	3	Rp 112.061.681	3	Rp 114.414.703	3	Rp 116.767.104	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	6	Rp 267.358.962	6	Rp 269.145.896	6	Rp 276.627.454	6	Rp 282.395.437	6	Rp 288.325.053	6	Rp 294.253.103	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	1	Rp 53.047.413	1	Rp 53.401.964	1	Rp 54.886.400	1	Rp 56.030.841	1	Rp 57.207.352	1	Rp 58.383.552	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	Rp 6.683.974	1	Rp 6.728.647	1	Rp 6.915.686	1	Rp 7.059.886	1	Rp 7.208.126	1	Rp 7.356.328	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	35	35	Rp 212.189.652	35	Rp 213.607.854	35	Rp 219.545.598	35	Rp 224.123.363	35	Rp 228.829.407	35	Rp 233.534.209	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan	100	100	Rp 1.548.692.172	100	Rp 1.559.043.091	100	Rp 1.602.380.443	100	Rp 1.635.791.818	100	Rp 1.670.139.457	100	Rp 1.704.478.031	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	30	Rp 36.443.573	30	Rp 36.687.149	30	Rp 37.706.956	30	Rp 38.493.188	30	Rp 39.301.451	30	Rp 40.109.500	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90	90	Rp 1.512.248.599	90	Rp 1.522.355.942	90	Rp 1.564.673.487	90	Rp 1.597.298.630	90	Rp 1.630.838.007	90	Rp 1.664.368.531	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik sesuai ketentuan	100	100	Rp 8.089.731	100	Rp 8.143.799	100	Rp 8.370.176	100	Rp 8.544.703	100	Rp 8.724.121	100	Rp 8.903.492	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	Rp 6.896.164	1	Rp 6.942.255	1	Rp 7.135.232	1	Rp 7.284.009	1	Rp 7.436.956	1	Rp 7.589.862	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	Rp 1.193.567	1	Rp 1.201.544	1	Rp 1.234.944	1	Rp 1.260.694	1	Rp 1.287.165	1	Rp 1.313.630	
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi	100	100	Rp 26.628.740.437	100	Rp 26.806.717.662	100	Rp 27.551.874.851	100	Rp 28.075.933.649	100	Rp 28.716.946.409	100	Rp 29.307.375.537	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	400	400	Rp 26.523.706.559	400	Rp 26.700.981.774	400	Rp 27.443.199.780	400	Rp 28.015.420.341	400	Rp 28.603.675.852	400	Rp 29.191.776.104	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	Rp 20.051.922	12	Rp 20.185.942	12	Rp 20.747.059	12	Rp 21.179.658	12	Rp 21.624.379	12	Rp 22.068.983	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	12	Rp 37.239.284	12	Rp 37.488.178	12	Rp 38.530.252	12	Rp 39.333.650	12	Rp 40.159.561	12	Rp 40.985.254	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			Rp 47.742.672	12	Rp 48.061.767	12	Rp 49.397.760	12	Rp 50.427.757	12	Rp 51.486.617	12	Rp 52.545.197	

4.4 Uraian Sub-Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung fungsi kelembagaan DPRD. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan dan sasaran strategis, serta memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka Sekretariat DPRD Kota Probolinggo merujuk pada nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5-5889 Tahun 2021. Keputusan ini mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Oleh karena itu, sub kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD selama periode Renstra disusun sesuai dengan nomenklatur tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.3. Penyelarasan ini menjadi landasan penting untuk menjamin akuntabilitas, integrasi, serta kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Berikut tabel 4.3 yang menggambarkan program dan subprogram kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025-2029:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kota	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Layanan Administrasi DPRD	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang – undangan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Meningkatnya kualitas legislasi, pengawasan, dan penganggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pembahasan Laporan Semester	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Orientasi DPRD	
			Pendalaman Tugas DPRD	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Penyusunan Program Kerja DPRD	
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Pelaksanaan Reses	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Penyusunan Kode Etik DPRD	
			Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Fasilitasi Tugas DPRD	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendukung terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban DPRD, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Capaian kinerja Sekretariat DPRD tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD.

Untuk menjamin bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat diukur ketercapaiannya, maka diperlukan indikator kinerja yang tepat dan terukur. Indikator Kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD, dalam mencapai sasaran strategisnya. Indikator ini memberikan sinyal atau rambu yang jelas apakah suatu kegiatan, program, atau sasaran telah berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.

Dalam konteks perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja dilakukan menjadi penting untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan bersifat SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Indikator kinerja tersebut juga ditetapkan sesuai dengan yang menjadi mandat dari RPJMD yang secara obyektif melekat sebagai tugas dari Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pelaporan akuntabilitas, serta perbaikan kinerja berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Probolinggo, serta diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unit kerja yang memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap lembaga DPRD pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85,07	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	
2	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	Nilai	72,62	73,02	73,41	73,81	74,21	74,61	75,00	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi secara lebih terfokus dan signifikan. IKK dipilih dari sekian banyak indikator yang tersedia, namun memiliki nilai strategis paling tinggi dan berdampak langsung terhadap keberhasilan misi organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, IKK menjadi alat ukur utama yang menunjukkan tingkat efektivitas peran sekretariat dalam mendukung kinerja DPRD, baik dalam aspek dukungan administratif, fasilitasi persidangan, layanan keprotokolan, maupun penyusunan produk hukum daerah.

Penetapan IKK dilakukan secara cermat agar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dengan jelas dan terukur, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. IKK juga mempermudah proses pengambilan keputusan karena menunjukkan aspek paling kritical dari kinerja organisasi. IKK yang tepat, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo akan mampu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian target strategis yang telah ditetapkan, dan ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	4,60	4,65	4,68	4,7	4,72	4,74	
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85,07	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	

BAB V


PENUTUP

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota Probolinggo. Dokumen Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memfokuskan arah kebijakan serta menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Probolinggo. Renstra ini merupakan pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini tidak hanya menjadi wujud perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kinerja DPRD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Renstra di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan penuh harapan kami meyakini bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan Sekretariat DPRD yang profesional, responsif, dan berdaya guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Probolinggo, 19 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Probolinggo


Drs. Teguh Bagus Sujawanto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051990031015

IKU SEKRETARIAT DPRD

PD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
SETWAN	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat DPRD